

WUJUDKAN TRANSPARANSI LAYANAN SOSIAL, BERSAMA OMBUDSMAN KALTENG LAKUKAN EVALUASI LAYANAN BANSOS 2024



Palangka Raya (16/04/2025) – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan setiap layanan dan program yang diusung Dinas Sosial Kota Palangka Raya salah satunya bantuan sosial permakanan dan sandang bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masuk dalam kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran, Dinas Sosial Kota Palangka Raya melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap program bantuan sosial permakanan dan sandang yang telah dilaksanakan pada tahun 2024. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari komitmen Dinas Sosial dalam membangun sistem pelayanan sosial yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah sebagai mitra strategis dalam pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Kehadiran Ombudsman menjadi bagian penting dari upaya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proses pelaksanaan program sosial, mulai dari pendataan penerima manfaat, verifikasi kelayakan, hingga proses distribusi bantuan. Bantuan sosial permakanan dan sandang merupakan salah satu program Dinas Sosial Kota yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para Penerima Manfaat (PM) agar mereka tetap hidup layak, sehat, dan terlindungi secara sosial.

Melalui kegiatan Monev ini, Petugas Dinas Sosial melakukan pengecekan langsung terhadap kelengkapan administrasi, validitas data penerima, kualitas bantuan yang disalurkan, serta mekanisme distribusi yang digunakan. Selain itu, dilakukan pula wawancara langsung dengan penerima manfaat guna mendapatkan gambaran menyeluruh terkait efektivitas dan dampak bantuan terhadap kesejahteraan mereka. “Transparansi adalah kunci utama dalam pelayanan sosial. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan sebagaimana mestinya,” tegas Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM., M.M.Kes.

Dalam kesempatan tersebut, pihak Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Dinas Sosial yang melibatkan lembaga pengawasan dalam proses evaluasi, serta mendorong agar praktik baik ini menjadi budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan daerah. Pihaknya menyarankan agar setiap program dan layanan Dinas Sosial disosialisasikan layanan dan pengaduannya baik melalui call centre Whatsapp, email, atau social media lainnya.

Ombudsman juga menyampaikan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal jalannya program sosial. Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam penyaluran bantuan, atau adanya keluhan penerima yang tidak ditindaklanjuti. –(AK)